



Tanggap Darurat Penanganan Tanggu; Latuharhary



air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

4 PERMASALAHAN
BANJIR JAKARTA

7 PENGGUNAAN *SMART DIKE*
SEBAGAI PENAHAN DINDING
TANGGUL

10 JAKARTA + BANJIR
—>SOLUSI?



JAKARTA KEBANJIRAN

ISSN 1693-8003



9 771693 800383

Pembina

Djoko Kirmanto
Mohamad Hasan • Mudjiadi
Eko Subekti • Arie Setiadi
Moerwanto • Pitoyo Subandrio
• Imam Agus Nugroho • Hartanto

Penanggung Jawab

Leonarda Ibnu Said

Pemimpin Umum

Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi

Trinanda SP Sitorus

Redaksi

Tine Rosdiana •
Kety Fillaily • Erytra Tiara •
Daswandi Budi Indra

Kontributor

Emir Faridz

Desain/Layout

M. Syauckani • Noor Cholis

TU/Sekretaris

Isbandiyah

Data

Nurullia Anjani •
Dewi Anggraeni • Marsono

Foto/Dokumentasi

M. Syauckani • M. Kurdi
• Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi

Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Gedung Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7396616 pes. 515
Fax. (021) 7210395
e-mail: humassda@yahoo.com
humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Selamat Tahun baru 2013. Di penghujung awal tahun baru ini, kita dihadapi kejadian banjir yang mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jalan utama di ibukota terendam banjir hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan, runtuhnya tanggul di sekitar Lathuhari mengakibatkan limpasan air dengan area genangan yang luas. Hal ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan bagaimana dengan pengelolaan banjir di ibukota?

Banjir akan sering terjadi manakala besaran faktor-faktor penyebab banjir semakin meningkat, antara lain kerusakan DAS, penurunan kualitas lingkungan, semakin hilangnya daerah resapan, alih fungsi lahan.

Sumber daya air merupakan bagian dari ekosistem, untuk itulah konservasi di daerah hulu memegang peranan penting, pendayagunaan air yang tepat guna, hingga pengelolaan daya rusak air menjadi suatu prasyarat yang penting.

Dalam hal pengelolaan sungai, sedimentasi, penyempitan ruang sungai, hingga penyumbatan di aliran sungai menjadi problematika tersendiri. Restorasi sungai bisa menjadi solusinya.

Pada edisi awal tahun ini, kami mencoba mengulas kembali tentang kejadian banjir di wilayah ibukota, apa permasalahannya, bagaimana mengelola banjir tersebut, hingga

terobosan-terobosan untuk mereduksi kejadian banjir tersebut.

Upaya mereduksi kejadian banjir merupakan ranah bersama antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Kebijakan, strategi, dan upaya mereduksi permasalahan banjir perlu ditinjau ulang untuk memberi peluang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berperan bersama.

Pada segmen lainnya, kami coba mengulas aspek-aspek lain terkait dengan kegiatan bidang sumber daya air. Kami juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pembaca untuk menyampaikan ide dan gagasannya mengenai pengelolaan sumber daya air kepada kami.





LAPORAN UTAMA
PERMASALAHAN BANJIR JAKARTA

Saat ini Indonesia sudah memasuki musim penghujan, tepat pertengahan bulan Januari lalu hujan terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Indonesia. Jakarta sebagai Ibukota juga tak luput dari banjir, seperti wilayah Sudirman dan Kampung Pulo serta wilayah yang paling parah adalah Pluit, Jakarta Utara.



LAPORAN UTAMA
PENGUNAAN SMART DIKE SEBAGAI
PENAHAN DINDING TANGGUL

Direktur Bina Pendayagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moewardi, dalam sesi wawancara dengan salah satu media massa nasional (8/2), mengatakan ada beberapa kendala yang ditemui berkaitan dengan perbaikan Tanggul Latuharhary saat terjadi banjir di Jakarta 17 Januari lalu.



LAPORAN UTAMA
JAKARTA + BANJIR—>SOLUSI?

Kejadian banjir yang terjadi di Jakarta pada pertengahan Januari 2013 dikarenakan kapasitas semua sistem saluran air, baik sungai dan drainase kota dayaampungnya terlampai. Selain itu, naiknya status siaga 1 di Bendung Katulampa, mengakibatkan Jakarta dilanda banjir yang cukup merata. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas manusia.



LAPORAN KHUSUS
NEGRI LIMA SIMULASI BENCANA

Curah hujan yang tinggi dengan intensitas ± 400 mm, disertai dengan gempa berskala 5,6 SR yang berpusat 51 Km di sebelah timur laut Kabupaten Maluku Tengah, menyebabkan terjadinya longsor material pada aliran Sungai Way Ela, longsor material tersebut membentuk sebuah bendungan alam (*natural dam*).



LAPORAN KHUSUS
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DITJEN. SUMBER DAYA AIR

Curah hujan yang tinggi dengan intensitas ± 400 mm, disertai dengan gempa berskala 5,6 SR yang berpusat 51 Km di sebelah timur laut Kabupaten Maluku Tengah, menyebabkan terjadinya longsor material pada aliran Sungai Way Ela, longsor material tersebut membentuk sebuah bendungan alam (*natural dam*).



LAPORAN KHUSUS
RAKERTAS KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN 2012

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang dihadiri oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), Jumat (18/1).

LAPORAN UTAMA

- 4 Permasalahan Banjir Jakarta
- 7 Penggunaan *Smart Dike* sebagai Penahan Dinding Tanggul
- 10 Jakarta + Banjir—> Solusi?

LAPORAN KHUSUS

- 14 Negri Lima Simulasi Bencana
- 17 Pelantikan Pejabat Struktural Ditjen. Sumber Daya Air
- 20 Rakertas Kegiatan dan Anggaran Tahun 2012
- 26 Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum

FOKUS

- 29 Pentingnya Pengelolaan Situ dan Waduk Sebagai Daerah Resapan Air
- 32 KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG: Berbagi Informasi, Sukseskan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

PROFIL INFRASTRUKTUR

- 35 Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas (Banyumudal-Serang-Yamansari)

PERSPEKTIF

- 37 Sinkronisasi Program dan Kegiatan O&P Sumber Daya Air
- 41 Potensi dan Tantangan Penyediaan Air Baku

BERANDA

- 43 HUT KE-32 HATHI: HATHI Diharapkan Tetap Profesional Dalam Menangani Sumber Daya Air

PERMASALAHAN BANJIR JAKARTA

Ada beberapa hal yang menyebabkan banjir terjadi di Jakarta seperti drainase yang buruk, daerah tangkapan air (*water catchment area*) yang sudah semakin berkurang, ruang terbuka hijau untuk menampung air dan sungai-sungai yang kedalamannya sudah penuh dengan sedimentasi serta permasalahan yang sangat pelik adalah sampah.

Dalam satu hari sampah di Jakarta terkumpul sebanyak kurang lebih sekitar 40 ton/hari. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan dalam acara kunjungan lapangan di Jakarta meninjau Pintu Air Manggarai 27 September 2012.

Permasalahan sampah yang tidak pernah bisa dapat teratasi dengan mudah dikarenakan ada beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berdekatan dengan badan sungai. "Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan sampah," jelas Moh. Hasan.



Saat ini Indonesia sudah memasuki musim penghujan, tepat pertengahan bulan Januari lalu hujan terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Indonesia. Jakarta sebagai Ibukota juga tak luput dari banjir, seperti wilayah Sudirman dan Kampung Pulo serta wilayah yang paling parah adalah Pluit, Jakarta Utara.





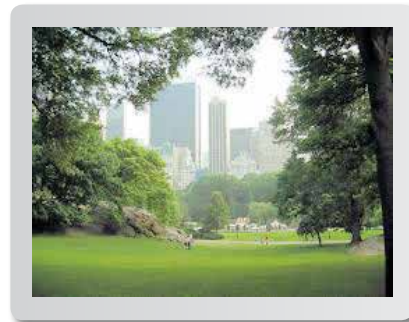
Permasalahan lainnya adalah mengenai sistem drainase kota yang kurang baik, karena penuhnya drainase dengan lumpur yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi drainase yang kurang baik, sebelumnya tim dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* yang bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane melaksanakan kegiatan *Jakarta Comprehensive Flood Management (JCFM)* yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan dibiayai oleh JICA.

“Pelaksanaan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan dan pengelolaan banjir yang komprehensif di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung,” jelas Imam Santoso selaku Kepala BBWS Ciliwung–Cisadane, (7/11/12), di Jakarta.

Kegiatan dari JCFM salah satunya adalah pembuatan kolam resapan yang menggunakan material dari Jepang yang disebut dengan *Cross Wave* yang mempunyai kekuatan penyerapan tiga kali lebih besar dari metode konvensional. Tujuan dari menggunakan *Cross Wave* adalah untuk membantu penyerapan air permukaan ke dalam tanah untuk mengurangi volume air yang masuk ke dalam sungai.

Kita ketahui bersama, banjir di Jakarta juga disebabkan oleh pengalihan lahan terbuka hijau yang berubah menjadi bangunan-bangunan bertingkat tinggi sehingga menyebabkan air tidak dapat menyerap. Di tahun 1965 ruang terbuka di Jakarta masih 37,2 persen, tahun 1985 tinggal 25,48 persen, tahun 2000 tinggal 9 persen, artinya semua sudah berubah dengan drastis. Bahwa lahan hijau sudah berubah untuk bangunan komersial, sementara di UU Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) minimal 30 persen.

Salah satu cara untuk mengurangi banjir di Jakarta adalah dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH adalah area yang memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang di tanami tumbuhan secara alamiah atau dengan sengaja (Sumber: Kamus Istilah Pekerjaan Umum, Bidang Tata Ruang).



Berkenaan dengan banjir yang terjadi di Jakarta, salah satu faktornya adalah permasalahan tata ruang yang 80 persennya sudah beralih fungsi sejak RTRW tahun 1985. Dari peraturannya sudah benar, hanya dalam segi penerapan di lapangan yang masih menyimpang sehingga banyak ditemukan perubahan secara drastis. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, yang paling krusial adalah mengenai sungai. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis tepian. (Sumber Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai).

Sungai menjadi bagian terpenting dalam sistem pengairan dan sumber kehidupan makhluk hidup. Sejarah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia seperti kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan dan industri.



Fungsi sungai bagi alam adalah sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. Kondisi tersebut harus terus dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.

Namun, kenyataannya saat ini sungai juga berfungsi sebagai tempat tinggal, ada beberapa bangunan yang terletak di badan sungai, selain menjadi tempat tinggal bahkan juga menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, sudah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air.



Dalam mengurangi tingkat banjir di Ibu Kota Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melakukan beberapa upaya dalam peningkatan infrastruktur.

Diantaranya adalah Kanal Banjir Barat (KBB), Kanal Banjir Timur (KBT), Stasiun Pompa Pluit (*East Pump Pluit*) dan melakukan beberapa normalisasi di beberapa sungai yang ada di Jakarta. Namun, saat ini yang sedang dibicarakan banyak orang adalah pembangunan Sudetan Ciliwung–KBT menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya dan selain pembangunan sudetan Ciliwung juga dilaksanakan pembangunan Waduk Ciawi.



Ditjen SDA Kementerian PU berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Menteri Keuangan serta Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan Sudetan Ciliwung.

“Pembangunan Sudetan Ciliwung nantinya akan mengurangi debit air yang masuk kedalam Kanal Banjir Timur (KBT) sebanyak 60 m³/det dengan panjang sudetan mencapai 2,1 Km dan lebar 4 m,” disampaikan Moh. Hasan dalam acara Dialog TV Kompas Petang (21/1), Jakarta.

Pembangunan Sudetan Ciliwung akan menelan biaya sebesar Rp 500 miliar dan akan diperkirakan selesai pada pertengahan 2014.

Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan sudetan sepanjang 2,1 km, seminimal mungkin melakukan pembebasan tanah, hal tersebut dikarenakan sudetan yang berbentuk terowongan ini akan berada di bawah Jalan Raya Otista 3.

Selain Sudetan Ciliwung pembangunan Waduk Ciawi juga masuk kedalam program Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Namun, hal tersebut tidak terlalu signifikan untuk mengurangi banjir Jakarta. Waduk Ciawi akan digunakan untuk sumber air baku. **(anj)**



PENGGUNAAN *SMART DIKE* SEBAGAI PENAHAN DINDING TANGGUL



Direktur Bina Pendayagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moewardi, dalam sesi wawancara dengan salah satu media massa nasional (8/2), mengatakan ada beberapa kendala yang ditemui berkaitan dengan perbaikan Tanggul Latuharhary saat terjadi banjir di Jakarta 17 Januari lalu.

Pertama, lokasi jebolnya tanggul tepat berada di dekat rel kereta menuju Manggarai. Untuk menangani hal tersebut, rel kereta harus diamankan terlebih dahulu supaya alat berat dapat masuk ke lokasi. Kedua, di lokasi terdapat baliho yang kondisinya cukup mengkhawatirkan, yang jika roboh akan dapat menimbulkan korban. Ketiga, lokasi berada tepat di bawah jembatan layang Kuningan sehingga alat berat sulit dikerahkan ke lokasi.

Kendala-kendala di atas menjadikan perbaikan Tanggul Latuharhary cukup rumit. Arie kemudian menganalogikan perbaikan tanggul dengan pengobatan pada kedokteran, di mana usaha pengobatan harus diupayakan tanpa menimbulkan komplikasi. Demikian juga dengan perbaikan Tanggul Latuharhary yang harus diupayakan sedemikian rupa tanpa menyebabkan runtuhnya turap.



Berangkat dari hal tersebut, Arie mengatakan di masa depan perbaikan tanggul di wilayah DKI Jakarta dan perkotaan akan menggunakan teknologi *smart dike* (tanggul pintar), dimana tanggul dapat terlimpasi air, tetapi tidak akan jebol.

Smart dike utamanya berfungsi sebagai penahan gerusan air, lalu diperkuat dengan parapet (dinding beton) untuk meninggikan tanggul. Namun mengingat *smart dike* yang sepenuhnya berupa beton akan menyebabkan tanggul menjadi *rigid*, penggunaan tanah sebagai penahan tetap harus diperhatikan. **(idr/kur)**



Penjaga Pintu Air Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat



DHARMA
WANITA
DITJEN SDA
MEMBERIKAN
BANTUAN
KEPADA
KORBAN
BENCANA
BANJIR



JAKARTA + BANJIR —> SOLUSI?



Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi (21/1 (www.kompas.com)) mengatakan, banjir yang melanda Jakarta sepekan ini telah menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Biaya bencana yang ditanggung untuk sekadar menyediakan makan bagi para pengungsi pun mencapai Rp 1 miliar lebih.

Ditegaskan Sofyan, stagnasi roda perekonomian di Jakarta akibat bencana banjir menyebabkan kerugian lebih dari Rp 1 triliun. Aktivitas perdagangan menjadi tidak berjalan, dan kawasan Industri Pulogadung juga ikut lumpuh karena tak memperoleh suplai listrik akibat gardu listrik terendam banjir.

Hal ini tidak pelak dipertanyakan pula oleh negara importir, karena bencana banjir berefek pada kegiatan ekspor komoditas ke luar negeri dari seluruh daerah di Indonesia yang bertumpu di Jakarta. "Importir itu mulai bertanya-tanya, kapan banjir di Jakarta bisa surut. Kendati mereka saat ini memahami Jakarta sedang dilanda bencana," kata Sofjan.

Kejadian banjir yang terjadi di Jakarta pada pertengahan Januari 2013 dikarenakan kapasitas semua sistem saluran air, baik sungai dan drainase kota dayaampungnya terlampaui. Selain itu, naiknya status siaga 1 di Bendung Katulampa, mengakibatkan Jakarta dilanda banjir yang cukup merata. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas manusia.



Banjir Jakarta di tahun 2007 dan 2013 Kondisi kejadian banjir pada tahun ini (2013-red) berbeda dengan kondisi tahun 2007. "Banjir yang terjadi di Jakarta hari ini (17/1) dikarenakan *over top* atau terlampauinya kapasitas saluran air. Jika pada tahun 2007 terdapat 78 titik, pada tahun 2013 terpantau 50 titik dari 62 titik banjir yang belum tertangani. Hal ini dikarenakan kami (Ditjen SDA-red) melakukan upaya pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara bertahap, mulai pembangunan Banjir Kanal Timur, hingga saat ini dengan terus melakukan upaya Normalisasi PAS (Pesanggrahan, Angke, dan Sunter)", demikian diungkapkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan dalam wawancara dengan para awak media massa nasional.

Berdasarkan program pengendalian banjir di DKI Jakarta, infrastruktur pengendali banjir dilakukan hingga tahun 2018. Namun demikian problematika banjir di Jakarta bukan

hanya faktor alam, namun kompleksitas persoalan sosial turut menyumbang persoalan banjir di DKI Jakarta, seperti sedimentasi, menyempitnya ruang sungai, hingga menumpuknya sampah.

"Penyumbatan, sedimentasi, hingga sampah, mengakibatkan drainase tidak mampu menampung air, sehingga air meluap dan mengganggu aktivitas manusia, dan juga dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir seringkali mengalami hambatan dalam upaya pembebasan lahannya", tambah Moh. Hasan.

Mengatakan bahwa banjir yang minggu lalu terjadi di Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi serta kapasitas saluran-saluran drainase yang tersumbat dikarenakan sampah yang memang selama ini menjadi momok untuk Jakarta. Namun, diakui Moh. Hasan, bahwa Pemerintah masih kurang dalam *monitoring*, sehingga tanggul Latuharhary yang sebenarnya turut masuk dalam program perbaikan,

sudah lebih dahulu diterjang debit air hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan jebolnya tanggul tersebut. Oleh karena itu, dalam menanggulangi permasalahan banjir di Jakarta, semua pihak terutama Pemerintah harus merencanakan dan melaksanakan secara komprehensif. Hal lainnya adalah, melaksanakan upaya struktur dan non struktur. Upaya struktur berupa pembangunan sudetan yang direncanakan akan disambungkan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Sementara untuk upaya non struktur, di mana lebih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi, yakni permasalahan sosial berupa pengendalian sampah dengan mensosialisasikan secara terus-menerus kepada seluruh masyarakat untuk merubah cara pandang dengan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, serta membangun sumur resapan di lingkungan rumah atau perkantoran.



Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, menyatakan bahwa selama ini koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sangat baik. "Pemerintah Pusat banyak berperan dalam bidang infrastruktur makro,

sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada permasalahan infrastruktur mikro, seperti membangun sistem *polder* di Jakarta bagian utara, yang telah selesai sebanyak 60% dan dilaksanakan secara bertahap," ujar Handayani.

Dirjen SDA menyampaikan bahwa penanganan banjir untuk jangka pendek menengah dapat dilaksanakan dengan membangun sumur resapan, seperti yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

GAGASAN PEMBANGUNAN DEEP TUNNEL

Saat ini pembangunan *deep-tunnel* menjadi sebuah solusi yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menangani masalah banjir. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan, berpendapat bahwa ide pembangunan *deep-tunnel* ini sangat baik sebagai terobosan terhadap kompleksitas masalah sosial dan masalah pembebasan lahan.

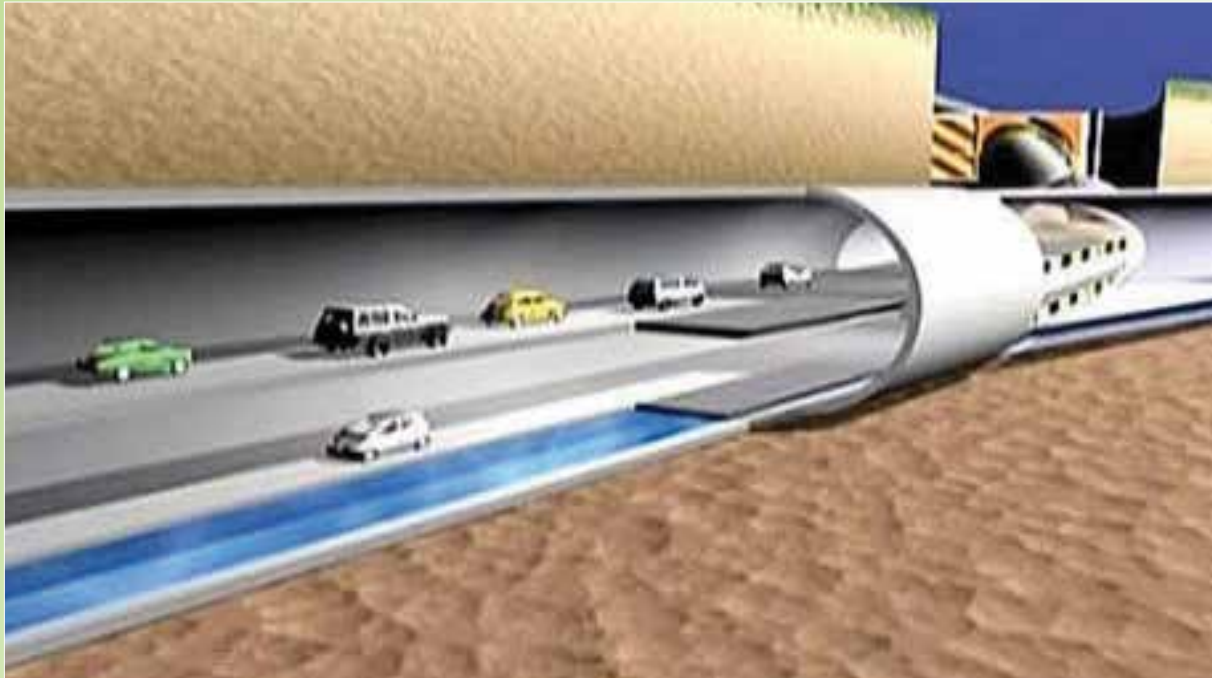
Moh. Hasan menyatakan lebih lanjut mengenai estimasi dana yang dibutuhkan untuk membangun *deep-tunnel*, seperti yang dinyatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk sepanjang 22 km, yaitu sejumlah 16 triliun Rupiah di tahun 2007, diperkirakan saat ini bisa mencapai 22 triliun Rupiah. Dikarenakan kerugian sangat besar akibat banjir Jakarta tahun 2007, yaitu mencapai 6,5 triliun Rupiah, ungkap Dirjen SDA, "dilihat dari aspek ekonomi, dana tersebut *feasible* (layak) mengingat dampak ekonomi sangat besar bila Jakarta terkena bencana banjir".

Dikatakan Moh. Hasan, kajian mengenai *deep-tunnel* ini telah

dilaksanakan sejak 6 tahun lalu. Dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya dirasakan tidak *feasible*, berkaitan dengan besarnya biaya pembangunan, maka terobosan pembangunan *deep-tunnel* tersebut menjadi tertunda hingga saat ini. Dalam perencanaan dan pengkajian kembali ide pembangunan *deep-tunnel*, Dirjen SDA menyampaikan bahwa saat ini dilakukan melalui tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para akademisi. Nantinya, *deep-tunnel* ini akan berfungsi untuk memotong puncak banjir, sehingga tidak membebani Kanal Banjir Timur. Bila semua hal berjalan lancar, tidak ada permasalahan sedikit pun, maka proses pembangunannya, yang telah dipresentasikan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, akan dapat dimulai di bulan Mei-Juni tahun ini.



kabarbumn.com



Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menyatakan konsep pembiayaan dengan melibatkan investor. Diperjelas Moh. Hasan, bahwa harus ada terobosan untuk menarik minat investor. Tentunya, pihak swasta akan lebih memilih menanamkan modal di bidang jalan tol dibanding air baku yang hanya mendatangkan keuntungan kecil. "Oleh karena itu kita harus bisa menarik investor dalam mekanisme *Public Private Partnership*", tutur Moh. Hasan. Maka sangat mungkin dikaitkan antara jalan tol dengan pembangunan *deep-tunnel* ini asalkan *layout* pembangunannya konsisten dengan *master plan* pengendalian banjir Jakarta, serta sesuai dengan pengembangan rencana koridor tol yang turut mendukung pengembangan transportasi DKI Jakarta.

Mengenai tantangan dan efektivitas pembangunan *deep-tunnel* dalam pengendalian banjir Jakarta, Dirjen SDA mengatakan bahwa hasil dari pembangunan *deep-tunnel* ini nantinya akan dapat memotong debit puncak air,

dan yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita sanggup memompa air secara kontinyu dalam waktu banjir dengan memperhitungkan ketahanan dan proteksi jaringan kabel listrik, juga mengatasi masalah sedimentasi dan pelumpuran. Moh. Hasan berharap keberlanjutan hubungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berjalan baik, bersamaan dengan perubahan budaya masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Adapun 13 sungai yang mengalir di Jakarta merupakan sungai lintas provinsi, ini berarti menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, selain juga ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Berkaitan dengan itu, tentu koordinasi yang baik sangat diperlukan dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat, agar revitalisasi di daerah hulu dapat berhasil. Menyinggung tentang penyelesaian banjir Jakarta di tahun 2017 atau 2018, Dirjen SDA menyampaikan bahwa semua upaya

terbaik penanggulangan banjir Jakarta akan terus dilakukan Pemerintah.

Masalah banjir di Jakarta tidak dapat serta merta hilang 100 persen. "Peran masyarakat untuk menjaga ekosistem dan kebersihan lingkungan merupakan hal penting untuk mengatasi banjir di ibukota Jakarta", tutur Moh. Hasan. **(nan)**

Glossary

Banjir adalah Peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat.

Sedimentasi adalah Penumpukan suatu material atau sedimen oleh media air yang mengakibatkan berkurangnya jarak antara permukaan air dengan permukaan sedimen itu sendiri.

NEGERI LIMA SIMULASI BENCANA



Curah hujan yang tinggi dengan intensitas ± 400 mm, disertai dengan gempa berskala 5,6 SR yang berpusat 51 km di sebelah timur laut Kabupaten Maluku Tengah, menyebabkan terjadinya longsor material pada aliran Sungai Way Ela, longsor material tersebut membentuk sebuah bendungan alam (*natural dam*).

Bendungan alam ini merupakan anugerah yang patut disyukuri namun harus tetap di waspadai. Dikarenakan kegagalan bendungan alam adalah bila terjadi *overtopping* atau limpasan akan mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang membawa aliran debris.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Maluku beserta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan gladi lapang tanggap darurat penanggulangan bencana bendungan alam Way Ela di Desa Negri Lima, Kecamatan Leituhu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, (2/1).

Tujuan diadakan gladi lapang ini adalah agar masyarakat di kawasan yang berpotensi terkena dampak memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana, yaitu daya antisipasi terhadap bencana, daya proteksi terhadap bencana, daya adaptasi pasca kejadian bencana dan daya pemulihan pasca terjadi bencana.

Moh. Hasan mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang besar Ditjen SDA Kementerian PU melakukan beberapa upaya teknis dalam mengantisipasi potensi kejadian bencana banjir bandang di Bendungan Alam Way Ela dengan melakukan pembangunan saluran pelimpah untuk mengalihkan



debit air agar tidak terjadi limpasan yang dapat mengakibatkan banjir bandang.

“Selain itu, juga dilakukan sistem peringatan dini dan membuat lapisan kedap untuk menahan terjadinya rembesan dan mereduksi bencana,” ujar Moh. Hasan.

Kegiatan gladi lapang ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Deputi 1

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB, jajaran Muspida Provinsi Maluku, Pemkab Maluku Tengah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Komando Resort Militer 151/Binaya serta Eselon 2 Ditjen SDA hingga masyarakat Desa Negri Lima.

Dalam gladi lapang tersebut disampaikan langkah-langkah apabila terjadi bencana, dimulai dengan sosialisasi tanda bencana, upaya tindakan pengungsian di daerah

Walaha, Kapaha, dan Patoi, hingga upaya tanggap darurat bila bencana itu terjadi. **(ard/anj)**



KUNJUNGAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR:

SALURAN PELIMPAH BENDUNGAN ALAM WAY ELA TERUS DIBANGUN

Kejadian longsor material yang terjadi di aliran Sungai Way Ela telah menyebabkan terjadinya bendungan alam (*natural dam*). Lokasi bendungan alam tersebut berada di Desa Negri Lima, Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Diperkirakan elevasi puncak bendungan alam Way Ela sudah mencapai 215,66 m dengan lebar genangan kurang lebih 300 m, dengan volume berkisar 16 juta m³. Jarak bendungan alam dengan Desa Negri Lima ±2,55 km, dimana terdapat 4.800 orang yang tinggal di desa tersebut.



Moh. Hasan dalam kunjungannya mendorong BWS Maluku untuk terus memantau Bendungan Alam Way Ela, yang hanya berjarak sekitar 1 jam perjalanan darat dari kota Ambon ini, agar dapat mereduksi bencana sekaligus memanfaatkan potensi di bendungan alam ini.

“Potensi ancaman di bendungan alam ini dipantau terus, seperti debit rembesan di sekitar Bendungan Alam Way Ela stabil berkisar 0,06 m³/detik dan jernih, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

GLOSSARY

Bendungan adalah Setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Sungai adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Bendungan alam ini merupakan anugerah dari Tuhan, namun disatu sisi juga menyimpan potensi bencana banjir bandang.

Untuk mengatasi terjadinya banjir bandang yang membawa aliran debris, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku telah melakukan beberapa upaya penanganan, yakni di tahun 2012 dilakukan upaya pekerjaan pompanisasi, melakukan analisis *dam break*, hingga melakukan pengadaan dan pemasangan *early warning system*. Di tahun 2013 mulai melaksanakan pembangunan *spillway*.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Yang perlu diwaspadai adalah puncak hujan pada bulan Mei–Juni, antisipasinya dengan perkuatan tebing, pembangunan *spillway*, pembangunan *check dam* di hilir, dan juga memotong elevasi puncak, agar dapat direduksi potensi bencananya,” jelas Moh. Hasan dalam jumpa wartawan di sela-sela kunjungan di Bendungan Alam Way Ela (2/1), Ambon.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Dirjen Sumber Daya Air didampingi Gubernur Provinsi Maluku, Deputi Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Direktur Bina PSDA, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, dan jajaran BWS Maluku (**ard/anj**)

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DITJEN SUMBER DAYA AIR



Pengangkatan dan pelantikan struktural menjadi hal yang biasa terjadi dan akan terus terjadi di dalam sebuah organisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan jabatan yang disebabkan pejabat sebelumnya memasuki masa purna bakti maupun adanya rotasi dan mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melantik dan mengangkat pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 11 Januari 2013 dan 30 Januari 2013. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, pejabat Eselon II.a yang dilantik adalah Ir. Eko Subekti, Dipl.HE menjadi Direktur Irigasi dan Rawa, Dr. A. Hasanudin, ME menjadi Direktur Bina Program dan Ir. Hari Suprayogi sebagai Sekretaris Dewan Sumber Daya Air. Sedangkan pejabat Eselon II.b yang dilantik adalah Ir. Adang Saf Ahmad, CES menjadi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ir. Agus Suprpto Kusmulyono, M.Eng, Ph.D., Ir. Yudi Pratondo, MM sebagai Kepala BBWS Bengawan Solo, serta Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl, HE sebagai Kepala BBWS Mesuji Sekampung.

Sedangkan untuk jabatan eselon III yang dilantik adalah Ir. Edy Juharsyah, M. Tech sebagai Kepala Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Drs. I Made Widiantara, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Ir. Birendrajana, MT sebagai Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Sungai dan Pantai, Ir. Bobby Prabowo, CES sebagai Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Irigasi dan Rawa, Ir. TB. Rachmad Affandi, Dipl, HE sebagai Kepala BWS Kalimantan II dan Ir. Sihyanto Prakoso, Sp.1 sebagai Kepala BWS Sulawesi III. Sementara itu, Ir. Agus Rudyanto, M. Tech sebagai Kepala BWS Sumatera IV, Ir. Djaya Sukarno, M. Eng menjadi Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BBWS Sumatera VIII dan Yunita Chandra Sari, SE, ST, MT sebagai Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum BBWS Ciliwung-Cisadane.

Memasuki tahun 2013, Djoko Kirmanto mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya adalah masalah Reformasi Birokrasi (RB).

Setelah melalui berbagai proses dan verifikasi laporan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lembaga independen, Kementerian PU mendapatkan nilai 64 yang diperoleh dari hasil kesesuaian dokumentasi 100 persen dan hasil kesesuaian *roadmap* 96 persen. Pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), disiplin kerja serta masalah aktual dalam memasuki tahun 2013 adalah hal yang harus



akuntabilitas dan jauh dari masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi RB tersebut merupakan keputusan akan peran aparatur birokrasi guna

Menteri PU menyatakan bahwa kinerja jajaran Kementerian PU tahun ini mencapai 91,84 persen dan perlu ditingkatkan terus untuk menilai tunjangan kinerja yang akan diberikan tahun ini juga kepada para pegawai. Djoko Kirmanto mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) minimal 3 bulan setelah menduduki jabatan dan melakukan pelaporan kembali setiap 2 tahun sekali atau setiap ada mutasi jabatan.

diperhatikan dalam menjalankan tugas. "Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sudah seharusnya kita dapat melaksanakan apa yang menjadi visi dari RB, yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia dimana tercipta pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk memasuki era implementasi birokrasi dan diharapkan dokumen *roadmap* Reformasi Birokrasi benar-benar dipelajari dan mulai dibahas di lingkungan kerja masing-masing.

Roadmap RB bersifat tidak statis, melainkan perlu dievaluasi dan dikembangkan agar apa yang telah dicapai oleh Kementerian PU saat ini jangan sampai menurun melainkan harus dapat meningkatkan



Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Eselon II dan Eselon III di lingkungan Ditjen. Sumber Daya Air Sebagai tindak lanjut Pelantikan Pejabat Pimpinan Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga melaksanakan Serah Terima Jabatan (sertijab) pada Kamis(17/1).



Pada sambutannya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh.Hasan, mengingatkan beberapa hal penting yang harus dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan Ditjen SDA. Ditegaskannya, bahwa para pejabat terutama para Kepala Balai Besar dan Kepala Balai, diberikan waktu satu minggu untuk beradaptasi dan menguasai pekerjaan barunya. Menguasai medan pekerjaan dalam satu minggu, berarti setiap Kepala Balai dan Kepala Balai Besar diharapkan sudah berkenalan dengan para Gubernur atau Bupati di lingkungan wilayah kerjanya, hingga juga memiliki nomor telpon genggam para kepala daerah setempat. Dan hal kedua adalah telah menghafal nama-nama anak buah hingga dua tingkat di bawahnya. Hal ini perlu untuk dilakukan dalam rangka apresiasi kerja di dalam internal jajaran yang dipimpin para Kepala Balai dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai tersebut.

Hal prioritas lainnya yang diingatkan Dirjen SDA, yakni agar para pejabat, terutama para Kepala BBWS dan BWS, mengetahui secara persis kondisi di lapangan, terutama bangunan-bangunan strategis seperti waduk. "Masalah-masalah yang bersifat pengoperasian seperti pintu air atau *shortcut*, Balai harus lebih menguasai daripada Pusat", tegas Moh. Hasan.



Untuk sekitar tiga minggu selanjutnya, Dirjen SDA mengarahkan agar pejabat-pejabat di lapangan harus mengetahui dan menghafal di luar kepala, seperti data teknis waduk, luas irigasi, di mana hal tersebut dapat memberikan impresi positif bagi para pimpinan yang berada di Pusat.

Khusus bagi para pejabat yang mengelola Operasi dan Pemeliharaan, sangat diingatkan oleh Moh. Hasan mengenai komitmen untuk menjaga keberlangsungan *main structure*, "kita harus melihat negara-negara seperti Jepang atau Korea, yang sangat menjaga kebersihan dan keindahan waduk-waduknya", ujarnya. Dikeluhkan Dirjen SDA, bahwa sebelum musim hujan, tiap Balai telah diminta untuk menginventarisasi dan menyampaikan upaya-upaya penanggulangan bencana yang ada di daerah koordinasinya.

Namun, hingga saat ini Dirjen SDA baru menerima data kurang dari 30%. Dirjen SDA juga meminta kepada Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan untuk menstandarkan sistem siaga bencana, yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. **(nan/anj/dew)**



RAKERTAS KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2012



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang dihadiri oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), Jumat (18/1). Dalam sambutannya, Kasubdit Evaluasi dan Kinerja Direktorat Bina Program selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menyatakan bahwa tujuan Rakertas ini adalah dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2012, serta untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran tahun 2013.

REVIEW KINERJA BALAI DI TAHUN 2012

Sekretaris Ditjen SDA, Mudjiadi, dalam sambutannya mewakili Dirjen SDA, mengumumkan BBWS dan BWS terbaik selama pelaksanaan anggaran tahun 2012 lalu. Untuk tingkat BWS, tiga terbaik adalah BWS Sumatera VII, BWS Maluku Utara dan BWS Papua Barat, di mana penyerapan tertinggi sebesar 99.79% telah dilaksanakan oleh BWS Sumatera VII. Sementara itu, untuk tingkat BBWS, tiga terbaik adalah BBWS Serayu-Opak, BBWS Sumatera VIII dan BBWS Ciliwung-Cisadane, dengan penyerapan tertinggi 98.50% yang telah dilaksanakan oleh BBWS Serayu-Opak.



Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mudjiadi mengingatkan bahwa mulai tahun ini sistem remunerasi telah diterapkan dan akan dirapel tahun 2013, dengan persyaratan bahwa tiap pimpinan terutama Kepala Balai telah menyelesaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Hal ini tentu juga disertai dengan kedisiplinan pegawai di lingkungan Ditjen SDA perlu terus ditingkatkan. "Ditambah lagi, Menteri Pekerjaan Umum mengingatkan bahwa mulai tahun ini laporan keuangan lembaga untuk Kementerian Pekerjaan Umum harus sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", jelas Mudjiadi SDA.



Hasil kinerja Balai-balai di Ditjen SDA turut menjadi pokok bahasan dalam Rakertas 2013. Beberapa Balai di bawah Ditjen SDA memiliki penyerapan yang kurang baik di tahun 2012. Penyebabnya hampir sama yaitu dalam hal pelelangan, lahan serta pagu anggaran. Sebagai contoh, pembebasan tanah yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan adanya penyerapan UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selain itu ada paket-paket *multi years* yang sudah terkontrak beberapa tahun lalu belum selesai karena masalah pagu anggaran. Hal ini karena ada tanah garapan yang menjadi milik negara namun digunakan oleh masyarakat yang tidak boleh dibayar oleh APBD.



PENGEN... BAN... DI WIL... DKI JA...

KANAL BANJIR BARAT

TUJUAN

Melindungi kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat (seluas 7.500 ha) dari luapan Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Kalibaru Barat dan Kali Ciliwung.

MANFAAT

Terkendalinya banjir di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Sarana Konservasi air dan sarana transportasi air (*water way*).



DATA TEKNIS

- Panjang kanal 17,3 km
- KBB Hulu 17,3 km
- KBB Hilir 5,8 km

Pada tahun 2009 peningkatan kapasitas alir BKB dari 330 m³/det menjadi 507 m³/det di pintu air manggarai. Dari 507 m³/det di PA Karet dan dari 842 m³/det menjadi 1.019 m³/det di PIK.

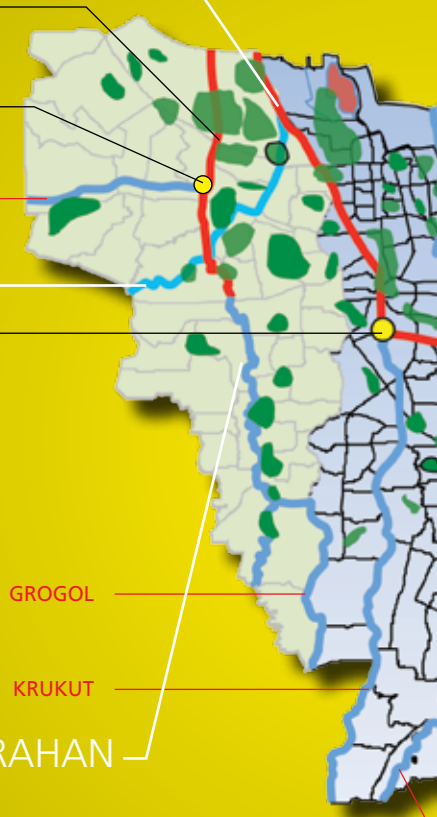
Pada tahun 2007–2009 telah diselesaikan Peningkatan Kapasitas dan Perkuatan Tebing Banjir Kanal Barat sepanjang 14,8 km dari pintu air Manggarai sampai dengan jembatan Pantai Indah Kapuk.

CENKARENG DRAIN

PA CENKARENG

MOOKERVART

PA KARET



GROGOL

KRUKUT

NORMALISASI KALI ANGKE

- Luas DAS: 255 km²
- Panjang sungai utama : 101 km
- Kapasitas existing alur (hulu) : 16 m³/det
- Debit banjir rencana (Q25)
- Pertemuan dengan cengkareng drain : 198 m³/det
- Jembatan Pondok Bahar: 160 m³/det
- Graha Bintaro : 135 m³/det
- Hulu Kali Angke : pegunungan Salak Bogor

Total panjang rencana pekerjaan Kali Angke 20 km, di bagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket pertama, yaitu 11.425 km dan panjang pekerjaan paket kedua 8.575 km.



NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN

Total panjang rencana pekerjaan normalisasi Kali Pesanggrahan 26.740 km, dibagi menjadi 3 paket. Paket pertama panjangnya 7.750 km. Paket kedua 7.730 km dan paket ketiga 11.260 km.

- Luas DAS : 142,1 km²
- Luas DAS Hulu : 67,5 km²
- Panjang Sungai utama (L): 66,7 km
- Kapasitas Existing Alur: 30 m³/det (existing minimal)



- Debit banjir rencana (Q50)
- Jembatan cinere: 114 m³/det
- IKPN: 205,23 m³/det
- Koneng Barrage: 220,3 m³/det
- Hulu Kali Pesanggrahan: pegunungan Salak (Bogor)

WADUK CIAWI
Luas DAS
Volume Tampung
Luas Genangan pa
Luas Genangan pa
Tinggi Bendungan
Panjang Puncak Be
Rencana Anggaran
Lokasi

MANAJEMEN BENCANA KANTOR

KANAL BANJIR TIMUR



TUJUAN
 kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara (seluas 160km²) dari luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung; melayani sistem drainase seluas 207 km² (catchment area); dan melindungi kawasan rawan genangan.



MANFAAT
 Terkendalinya banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sarana konservasi air dan sarana transportasi air (water way).

DATA TEKNIS

- Panjang kanal 23,5 km
- Lebar Kanal: 100–200–300 m
- Kedalaman saluran: 3–7 Km
- Debit rencana Q 100
- Daerah Hulu : 290 m³/det
- Daerah Hilir : 390 m³/det
- Realisasi s/d 2009 : 23,5 km

Total panjang pekerjaan kali sunter 18, 75 km. Rencana pekerjaan normalisasi sungai dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Pertama, Sunter paket 1 sepanjang 12,45 km dan sunter paket 2 sepanjang 6,30 km.



NORMALISASI KALI SUNTER

Luas DAS : 73,1 km²
 Panjang sungai utama (L): 37 km
 Kapasitas existing alur: 11–28 m³/det
 Debit banjir rencana Q25

- Pertemuan dengan KBT : 146 m³/det
- Lubang buaya : 130 m³/det
- Jembatan delta : 120 m³/det

Hulu kali Sunter : kelurahan Cimpaeun Kota Depok

Luas DAS	: 105,1 km ²
Luas lahan MAN	: 35,67 x 106 m ³
Luas lahan MAB	: 137,08 ha
Luas lahan MAB	: 146,88 ha
Luas lahan Dasar Sungai	: 90 meter
Luas lahan endungan	: 1417,70 meter
Luas lahan	: 3,9 Triliun
Luas lahan	: Desa Gadog, Bogor

JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE (JEDI)
 Salah satu proyek yang akan diusulkan untuk menangani banjir Jakarta adalah *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI) yang termasuk dalam proyek Mitigasi Banjir Jakarta (*Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP*).

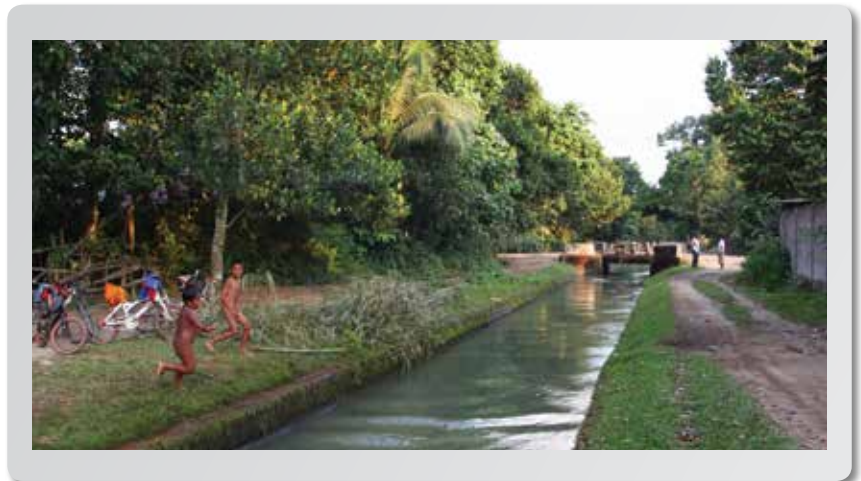
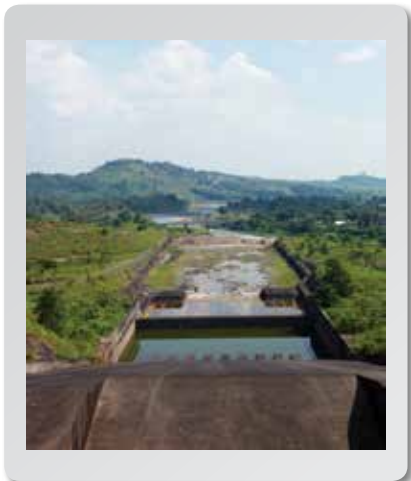
Proyek JEDI akan dilakukan di beberapa lokasi sesuai dengan kewenangannya. Ditjen SDA, tiga kanal banjir yang terletak di *Cengkareng Drain*, Kanal Banjir Barat dan Sunter. Tiga saluran drainase nasional yang menjadi kewenangan Ditjen Cipta Karya, yaitu Tanjung, Angke Hilir dan Cideng-Thamrin. Lima saluran drainase yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), yaitu Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng, dan Krukut-Cideng serta lima waduk yang menjadi kewenangan (DPU) Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III dan Waduk Melati.

EVALUASI KERJA 2012 DAN RENCANA 2013

Menjelaskan serta menanggapi evaluasi kinerja Ditjen SDA di tahun 2012 serta rencana kerja di tahun 2013, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan menyampaikan, "Direktorat Sumber Daya Air saat ini berada di posisi terendah dari tiga Direktorat terbesar di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Dimana posisi keuangan saat ini 86,78% sedangkan fisiknya 91,51%". "Kalah *start*" serta kualitas program yang kurang bagus menjadi penyebab utama kurangnya penyerapan di tahun 2012.

Di tahun 2013, diharapkan banyak kualitas program yang potensial bisa terserap. Moh. Hasan mengingatkan agar berhati-hati dengan *multi years contract* dikarenakan nilai anggarannya yang cukup besar. "Tahun 2013 ini sudah ada beberapa paket yang sudah dimulai dari bulan November lalu, dan ada 16 paket yang sudah diumumkan. Kebutuhan akan Sumber Daya Air (SDA) cukup tinggi, tetapi belum mampu merealisasikannya dalam bentuk program yang konkrit dan memberikan hasil yang bermanfaat dan efektif," ujar Moh. Hasan.

Selain itu dalam hal irigasi masih banyak yang harus dibenahi. Pembangunan waduk dan embung yang bersifat tampungan dan pengendalian banjir menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan pembangunan waduk mempunyai dua manfaat sekaligus, yaitu pengendali daya rusak dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air. Dari 56 potensi waduk, baru 13 waduk yang sudah dibangun. Untuk pengendalian banjir, yang harus diperhatikan yaitu master plan dan bagaimana pencapaiannya.

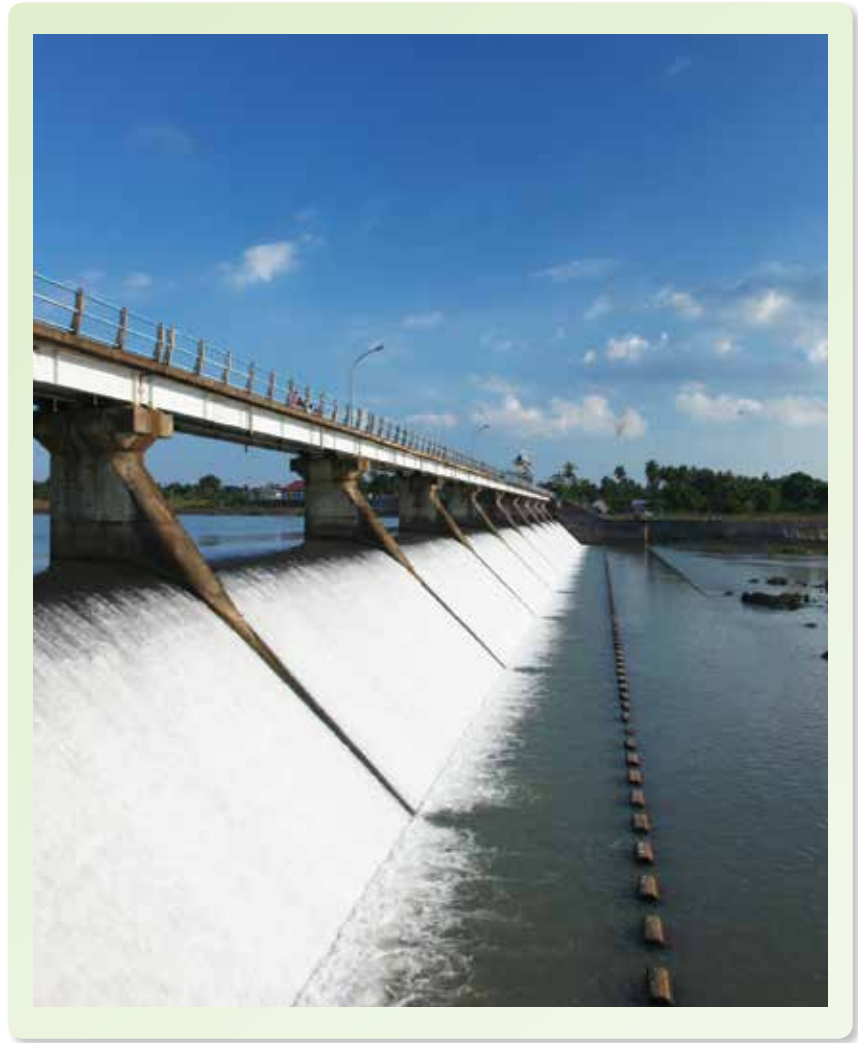
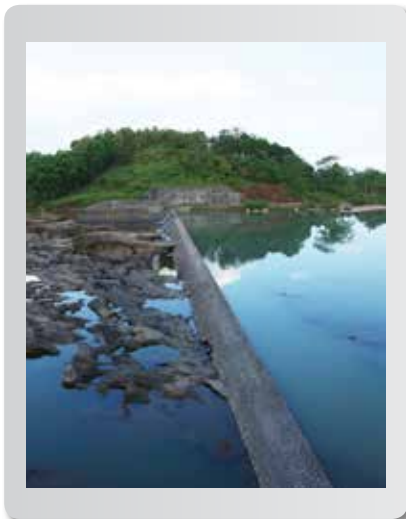


PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA BARU

Turut hadir dalam acara Rakertas Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan beberapa hal mengenai penyerapan tenaga kerja, “ditekankan di tahun 2013 ini tercipta kesempatan kerja serta bertambahnya lapangan kerja untuk kurang lebih 1 juta jiwa, dan mempertahankan yang sudah ada seperti tahun lalu, karena adanya kenaikan UMR (Upah Minimum Regional)”.

Menurutnya, Ditjen SDA mempunyai peran penting dalam hal ini karena penciptaan kesempatan kerja berada di program APBN. Hermanto Dardak menambahkan, pemerintah mempunyai program utama yaitu Percepatan *Master Plan* dan perluasan ekonomi nasional.

Dalam paparan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, perkembangan 10 tahun terakhir mengenai lapangan kerja di Indonesia, tahun 2002 hingga 2005, tambahan angkatan kerja melebihi tambahan kesempatan kerja, sehingga menyebabkan jumlah penganggur



meningkat. Sedangkan tahun 2008 hingga 2012 kesempatan kerja netto berada pada kisaran 350–600 ribu, yang berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dari 619 ribu jiwa di tahun 2011 menjadi 460 ribu jiwa di tahun 2012.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk menambah kesempatan kerja adalah melalui program-program APBN, kegiatan investasi dan usaha seperti infrastruktur, industri, pariwisata dan properti, efektivitas kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), iklim investasi, usaha dan tenaga kerja diperbaiki berikut dengan akses finansial dan kewirausahaan. Contoh seperti daerah

Kalimang yang memasok air dari waduk Jatiluhur, menggunakan Perum Jasa Tirta. **(nan/anj/dew)**

GLOSSARY

Embung/Waduk Lapangan

adalah Tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Waduk adalah Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

SINKRONISASI AIR BAKU UNTUK AIR MINUM



Sejumlah kota-kota besar seperti Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan dan Sulawesi saat ini mengalami krisis kelangkaan air baku untuk air minum, karena semakin lama semakin sulit untuk mencari sumber air baku. Dan menjadi faktor utama penyebab krisis air baku adalah degradasi lingkungan DAS.

Berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2009 diketahui bahwa keseimbangan air di wilayah Jawa-Bali sudah defisit -69.281 juta m³/tahun, ketersediaan 31.636 juta m³/tahun sedangkan kebutuhan 100.917 juta m³/tahun dan keseimbangan air di wilayah Nusa Tenggara sudah mendekati kritis, ketersediaan 7.759 juta m³/tahun sedangkan kebutuhan 2054 juta m³/tahun.

“Data tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan air baku nasional adalah 175.179 juta m³/tahun dan diprediksi kebutuhan air baku secara nasional untuk kebutuhan domestik dan industri pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 55.762 juta m³/tahun dan pada tahun 2030 yang akan datang meningkat menjadi 276.125 juta m³/tahun, berarti dalam kurun waktu 15 tahun akan meningkat menjadi 5 kali lipat,” jelas Imam Agus Nugroho, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional, mewakili Direktur Jenderal SDA dalam acara *Workshop Sinkronisasi Penyiapan Usulan Program Kegiatan Air Baku untuk Air Minum TA 2014*, yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK), 6–7 Februari 2013, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tantangan utama dalam rangka pembangunan penyediaan air baku untuk air minum diantaranya adalah tidak setiap kabupaten/kota mempunyai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air baku karena degradasi DAS.

Dan tantangan tersebut harus dihadapi untuk memenuhi Standar Pelayanan minimal yaitu 60 lt/orang/hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal 2, bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas, dan pasal 20 ayat 1,

konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan koordinasi yang harmonis,

selaras dan terpadu serta komitmen yang kuat untuk berperan serta dalam kegiatan konservasi lingkungan di daerahnya masing-masing demi menjaga ketersediaan air baku secara berkelanjutan.

PENGEMBANGAN AIR BAKU

Ditjen SDA dan Ditjen CK serta beberapa Pemprov, Pemkab dan Pemkot, telah melakukan upaya nyata dalam rangka penyediaan air baku untuk air minum diantaranya yaitu di Provinsi Jawa Tengah, telah ditandatangani 9 MoU SPAM Regional yaitu Bregas, Dadimuria, Wososukas, Keburejo, Purbamas, Wononegara, Petanglong, Semarsalat dan Gelangmantul.

Selain itu Ditjen SDA juga melakukan beberapa kegiatan pembangunan penyediaan air baku dalam rangka mendukung program MP3EI (*Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*) antara lain pembangunan transfer interbasin Cibatarua-Cilaki-Cisangkuy, yang nantinya akan mensuplai air baku sebesar 1.400 lt/dt untuk kawasan Metropolitan Bandung dan pembangunan *Water Conveyance*



Karian Dam, yang nantinya akan mensuplai air baku sebesar 9.500 lt/dt untuk kawasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Dalam rangka pencapaian target MDGs 2015 yaitu proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum untuk perkotaan dan perdesaan sebesar 68,87%, Ditjen SDA telah menetapkan target Renstra 2010–2014 untuk pembangunan unit air baku sebesar 43,35 m³/det. Realisasi capaian *outcome* pembangunan penyediaan air baku dari TA 2010–TA 2012 adalah sebesar 29,84 m³/det. Dan capaian *outcome* air baku sebesar 29,84 m³/det. Capaian *outcome* air baku sebesar 29,84 m³/dt ini bila

dimasukkan dalam grafik target MDGs 2015 sudah mencapai 59,00% dari target MDGs 68,87%.

Direktur Irigasi dan Rawa, Eko Subekti mengatakan agar BBWS dan BWS dalam setiap usulan program kegiatan penyediaan air baku untuk air minum harus memperhatikan kesiapan sumber dana, kesiapan desain, kesiapan lahan dan terkoneksi dengan baik dengan infrastruktur hilir (unit produksi s/d unit pelayanan).

Selain itu dalam TA 2013 Direktorat Jenderal SDA juga diberi tanggung jawab untuk membangun beberapa embung untuk peternakan di provinsi NTT dan Provinsi Papua Barat.

Begitu pula dengan kebutuhan air baku untuk air minum di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar serta kawasan pesisir. Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, pembangunan infrastruktur air baku di kawasan perbatasan sedang dipacu penyelesaiannya seperti pembangunan Embung Sebatik yang berada di kawasan perbatasan dengan Malaysia/ Sarawak dengan *outcome* air baku untuk air minum sebesar 150 lt/dt. "Dalam waktu dekat akan dibangun pula Waduk Teritip yang nantinya akan mensuplai air untuk kota Balikpapan sekitar 200 lt/dt yang juga berfungsi sebagai sarana penyediaan air baku,"

lanjut kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Irawan Hartono.

Begitu pula dengan pembangunan Embung Pulau Nipa yang berada di kawasan perbatasan dengan Singapura dengan *outcome* air baku untuk air minum sebesar 1,5 lt/dt dan diharapkan selesai pada TA 2013 ini.

"BBWS dan BWS apabila di lapangan menemui rekan-rekan dari Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen CK dan Pemprov/Pemkab/Pemkot telah membangun infrastruktur hilir yaitu unit produksi sampai dengan unit pelayanan, sedangkan unit air baku

belum tersedia, maka harus mencari solusi yang tepat agar unit air baku tersebut dapat segera dibangun dan terkoneksi sehingga dapat secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat," lanjut Eko Subekti. **(tin/ky)**



PENTINGNYA PENGELOLAAN SITU DAN WADUK SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR



Namun demikian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten terkait terus berupaya untuk merehabilitasi situ-situ tersebut, diantaranya dengan melakukan pengerukan, memberi pembatas (*boundary*), pembangunan tanggul, dan membuat *jogging track* di lokasi situ-situ tersebut, sehingga ada batasan jelas antara kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air/konservasi, dan kawasan hunian masyarakat.

Lebih lanjut Moh. Hasan menjelaskan kritisnya kondisi situ-situ tersebut turut dipicu oleh kelalaian pengelola situ. Situ sebagai wadah tampung air harus berfungsi sebagai daerah konservasi air, dan tidak boleh dihuni atau digunakan sebagai lahan pemukiman. Aturan jelas mengatakan, untuk wilayah di luar kota, daerah sempadan situ adalah sepanjang 50 meter dari bibir situ, sehingga tidak boleh dibangun apapun di sekitarnya kecuali tanaman yang dapat berfungsi untuk menyerap air, sementara untuk situ dalam kota daerah sempadan situ adalah sepanjang 15 meter dari bibir situ. Namun disayangkan, banyak pengelola situ yang lemah dalam pengawasan terhadap situ-situ tersebut.



Sebagian besar situ di Jabodetabek berada dalam situasi kritis karena terjadi penyerobotan lahan dan peralihan fungsi. Dari total sebanyak 204 situ di Daerah Aliran Sungai Ciliwung–Cisadane yang mengalir wilayah Jabodetabek, sekarang hanya tersisa sebanyak 180 buah situ, di mana 24 di antaranya telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mohamad Hasan, dalam wawancara dengan salah satu media massa nasional (7/2).



Untuk menanggulangnya, Dirjen SDA menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota/kabupaten terkait dan Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi permasalahan situ. Moh. Hasan mencontohkan, pada kasus Situ Antap yang telah diuruk sedikit demi sedikit oleh pengembang. Saat pengecekan ke lokasi ditemukan adanya penyerobotan lahan dan sertifikasi kepemilikan lahan sempadan situ.

Menghadapi kasus seperti itu, Kementerian PU sebagai pengelola sumber daya air mengambil sikap tegas. Sempadan situ tidak boleh disertifikasi menjadi milik pribadi/pengembang, walaupun sertifikat telah terlanjur dikeluarkan, peruntukan fungsi lahan harus tetap sebagai daerah konservasi. Koordinasi dan pengecekan ini telah dilakukan oleh Ditjen SDA Kementerian PU dan pemerintah kota/kabupaten selaku pihak yang mengeluarkan izin

bagi pengembang. Pemerintah kota/kabupaten baru dapat mengeluarkan izin jika telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian PU.

Namun demikian, tidak semua pengelola situ lemah dalam melakukan fungsi pengelolaannya. Moh. Hasan memuji Pemerintah Kabupaten Depok yang sangat serius dalam mengelola situ-situ di wilayah mereka. "Pemerintah Kabupaten Depok membentuk Kelompok Kerja dalam mengelola situ, yang tidak saja melibatkan para pejabat terkait, tetapi juga mengerahkan masyarakat untuk merawat dan memelihara situ," ujar Moh. Hasan.

Sementara itu, pengelolaan situ-situ di wilayah DKI Jakarta sepenuhnya merupakan kewenangan Pemprov. DKI Jakarta. Dari 16 situ yang ada di DKI Jakarta, baru satu situ yang telah direhabilitasi. Namun untuk 21 waduk

yang ada di hilir telah rutin dilakukan. Namun, beberapa kondisi yang terjadi sangat disayangkan, di mana terjadi kelalaian dan pembiaran dari pengelola situ, sehingga pembangunan hunian-hunian liar makin lama makin menyerobot ke tengah waduk, yang makin mengurangi daerah resapan air, seperti yang terjadi di Waduk Pluit.

Dengan makin berkurangnya daerah resapan air yang meningkatkan potensi terjadinya banjir, Ditjen SDA Kementerian PU telah melakukan berbagai antisipasi yang bersifat struktural dan non struktural. Antisipasi struktural antara lain dilakukan dengan membangun waduk kecil dan *long storage*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU saat ini telah merencanakan pembangunan 10 waduk baru termasuk Waduk Ciawi yang berkapasitas 33 juta m³. Selain itu Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan 21 waduk baru di

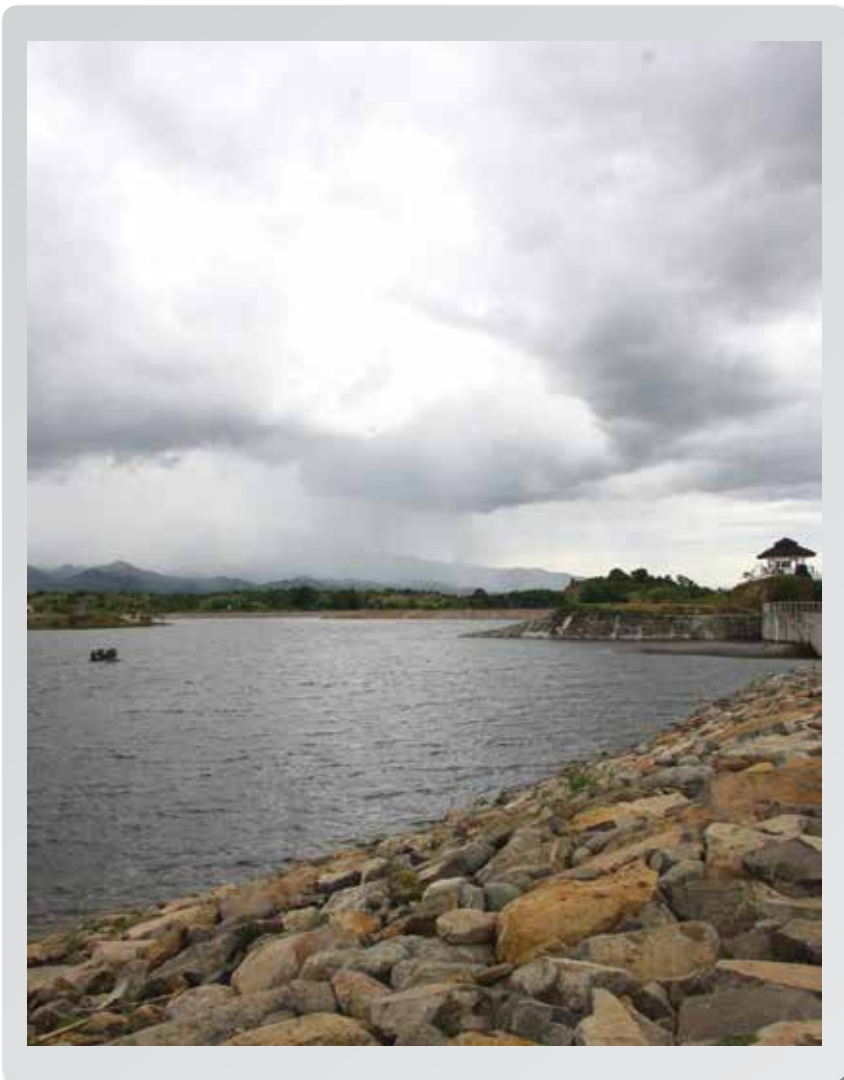
sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Pembangunan waduk dan *long storage* ini bertujuan untuk mengurangi aliran permukaan (*run off*) dan debit puncak (*peak flow*) supaya debit banjir bisa berkurang. Namun upaya antisipasi struktural tersebut harus dibarengi dengan upaya non struktural melalui partisipasi masyarakat. Hasan menerangkan bahwa menurut Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Sumur Resapan, setiap pengembang yang akan mengembangkan lahan dengan luas di atas 5.000 m wajib membuat kolam/sumur resapan. Tiap rumah juga diwajibkan melakukan hal yang sama, di antaranya dengan membuat biopori.

Terkait dengan target Ruang Terbuka Hijau (RTH), minimum seluas 30% dari luas wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Tata Ruang, Hasan mengatakan langkah-langkah menuju ke sana telah kelihatan membaik. Penambahan RTH dilakukan di antaranya dengan pengembangan dan penambahan taman, revitalisasi waduk, pembangunan waduk baru dan normalisasi sempadan sungai seperti di Kali Ciliwung dan Kali Krukut.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan, upaya penanggulangan banjir harus dititikberatkan pada pembenahan sistem utama seperti normalisasi sungai utama, rehabilitasi sistem drainase

makro dan mikro, pembangunan daerah resapan air, dimana semua harus dilakukan secara bersamaan. Karena debit puncak (*peak flow*) banjir yang masuk ke Jakarta cukup besar, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten dan masyarakat. Kementerian PU mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan situ dan mendorong pemerintah provinsi/kabupaten untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sumur resapan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai daerah resapan berarti terkait dengan resapan di daerah hulu. Untuk DKI Jakarta, saat ini Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dioptimalkan fungsinya sebagai daerah resapan air dengan tujuan memperkecil aliran permukaan (*run off*) di daerah kota dan utara Jakarta. Secara alami, Jakarta merupakan daerah bertopografi rendah, di mana 40% wilayahnya berada di bawah permukaan air laut, sehingga sangat berpotensi mengalami banjir. "Untuk meminimalisasi banjir tersebut, kami mengharapkan partisipasi masyarakat dengan membangun sumur resapan dan biopori. Selain itu kami juga mengharapkan masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sistem drainase makro dan mikro yang saat ini banyak tidak berfungsi. Kementerian PU telah berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi banjir dengan terus-menerus memperbaiki sistem utama, normalisasi sungai, pembangunan waduk dan sudetan," pungkask Moh. Hasan. **(idr)**



GLOSSARY

Daerah Aliran Sungai (DAS)

adalah Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG:

BERBAGI INFORMASI SUKSESKAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU



Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam hal pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya air terpadu. Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan dalam kondisi meteorologi dan geomorfologi, sehingga *Integrated Water Resources Management (IWRM)* menjadi pembahasan yang umum dilakukan oleh kedua negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang telah memperkuat kerjasama di bidang ini melalui bantuan ahli, proyek kerjasama teknis, lokakarya dan seminar.

IWRM di negara Jepang telah dilaksanakan secara terintegrasi antar seluruh *stakeholder*, dan telah terjalin kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Pemerintah Pusat, instansi yang terlibat dalam kegiatan IWRM adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Kementerian Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Kementerian Perekonomian Perdagangan dan Industri, Kementerian Lingkungan, serta Badan Sumber Daya Air dan Manajemen Bencana. Untuk Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Badan Operasi dan Manajemen Air Minum, Operasi dan Manajemen Irigasi, Operasi dan Manajemen dari Industri Pengairan, serta Badan Pemerintah untuk Peningkatan dan Pelestarian Sungai.

Menurut data yang disampaikan oleh Masanobu Miyazaki, Direktur Perencanaan Sumber Daya Air Kementerian Lahan Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata Jepang, negaranya telah mengembangkan organisasi dan rencana dalam rangka mempromosikan IWRM.

Selain pengelolaan air yang diterapkan melalui Undang-Undang Sungai (yang disahkan mulai tahun 1896 dan dalam pelaksanaannya telah direvisi pada tahun 1997), dalam kasus tertentu di mana permintaan air meningkat pesat, IWRM dipromosikan melalui



Perum Jasa Tirta I (PJT I), Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), *Japan Water Agency (JWA)* dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

Moh. Hasan menyatakan bahwa salah satu bentuk kerja sama yang kuat dan berhasil antara Indonesia dan Jepang dapat terlihat dari proyek *Brantas River Basin* serta beberapa program kerja sama lainnya. Oleh karena itu, kegiatan *joint workshop* ini merupakan media yang baik dalam rangka transfer pengetahuan serta sebagai petunjuk teknis bagi para profesional di bidang teknik sumber daya air untuk belajar menerapkan IWRM secara optimal dari negara Jepang.

rasionalisasi pembangunan yang komprehensif dan pemanfaatan sumber daya air yang dirasionalisasikan oleh Undang-Undang Pengembangan Sumber Daya Air.

“Pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management*) memiliki tujuan pendekatan dalam hal kebijaksanaan dan pengelolaan strategi yang terkait dengan sumber daya air

dan pengelolaan banjir untuk memaksimalkan perekonomian serta permasalahan sosial yang ada”, jelas Moh. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam *Workshop Indonesia-Japan Joint Integrated Water Resources Management (IWRM) “Capacity Development”* (29/1). Kegiatan ini merupakan kerja sama yang dilakukan antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang,





Pengelolaan sumber daya air terpadu juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem penting, dengan saling memperkenalkan pengetahuan dan pengalaman terbaru, yang dilakukan sebagai bentuk kerja sama antar negara.

Dalam mempromosikan serta mempraktekkan IWRM, setiap individu yang terkait di dalamnya harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam organisasi yang bergerak di bidang sumber daya air.

Pengembangan kapasitas para petugas di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertujuan untuk meningkatkan kinerja di lapangan, strategi harus didasarkan pada realitas lapangan dan diwakili oleh tindakan nyata, yang berupa peningkatan kemampuan untuk melaksanakan riset dan menganalisa, perencanaan, implementasi proyek, operasi dan pemeliharaan, serta manajemen resiko.

Yoshikazu Soga, *Chief of Engineer* dari JWA, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan di Jepang didahului oleh penyatuan kesamaan pemikiran bahwa air bila terlalu banyak jumlahnya maka akan mengakibatkan banjir, sedangkan air bila terlalu sedikit akan mengakibatkan kelangkaan air, oleh karena itu air perlu dikelola dengan baik. Dikatakannya, bahwa dalam membangun

pengelolaan sumber daya air yang terpadu, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan finansial, serta penggunaan teknologi terkini merupakan hal yang penting. Selain itu kerja sama seluruh *stakeholder* sangat penting untuk mengelola air dari hulu hingga hilir.

Hal lainnya juga turut disampaikan oleh Ketua Badan Sertifikasi HATHI, Basoeki Hadimoeljono, yang menyimpulkan bahwa Pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk bekerja sama dalam membangun kemampuan para sarjana teknik di bidang sumber daya air dalam bentuk *job training* di luar negeri, meningkatkan jumlah para teknisi yang bersertifikat, dan membuat teknik sumber daya air menjadi hal yang menarik bagi para sarjana teknik yang masih berusia muda, dengan memberikan penghargaan berupa insentif yang memadai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mudjadi, mengatakan bahwa sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan perubahan paradigma serta cara berpikir bagi para profesional di bidang sumber daya air untuk dapat menerapkan manajemen sumber daya air yang terpadu. **(nan/anj/dew)**



PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BAKU KAWASAN BREGAS (BANYUMUDAL-SERANG-YAMANSARI)



Air merupakan kebutuhan pokok dan sumber penghidupan masyarakat yang kuantitas ataupun kualitasnya harus terus ditingkatkan, bersamaan dengan kebutuhan yang meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk. Sinkronisasi dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang ada di Jawa Tengah terus dilakukan agar pemberdayaan sumber daya air menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan Penyediaan Air Baku untuk Air Minum kawasan Bregas (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal), dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait. Hal ini didasari oleh salah satunya, target *Millenium Development Goals* (MDGs), di mana Pemerintah telah mencanangkan program penyediaan air bersih melalui penambahan 10 juta sambungan rumah sampai tahun 2015. Hal lainnya adalah bahwa kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah merupakan wilayah yang sering mengalami masalah ketersediaan air bersih di musim kemarau.

Maksud dari pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas tahap I (Banyumudal-Serang-Yamansari) dalam menyediakan prasarana jaringan air baku untuk air minum sepanjang ± 20 km dengan kapasitas ± 250 liter/detik, di kawasan Bregas. Sedangkan tujuan dari kegiatan pembangunan ini antara lain; penambahan air baku untuk air minum Kabupaten Brebes sebesar ± 75 liter/detik (dari rencana total 200 liter/detik), penambahan air baku untuk air minum kabupaten Tegal sebesar ± 75 liter/detik (dari rencana total 200 liter/detik). Lainnya adalah penambahan air baku untuk air minum kota Tegal sebesar ± 100 liter/detik (dari rencana total 250 liter/detik), serta terwujudnya tambahan pasokan air baku untuk air minum kawasan Bregas secara bertahap.



Berdasar hasil keterpaduan program tersebut disepakati target penambahan penyediaan air baku untuk air minum di Kawasan Bregas sebesar 650 liter/detik sampai dengan tahun 2014, yang memanfaatkan sumber air di kawasan tersebut bersama-sama, yaitu mata air Banyumudal untuk 100 liter/detik, mata air Serang disediakan sebanyak 150 liter/detik, mata air Suniarsih untuk 150 liter/detik, serta mata air Tuk Suci sebanyak 250 liter/detik.

Pelaksanaan pembangunan jaringan air baku Bregas secara garis besar dibagi dua, yaitu pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas tahap I (Banyumudal–Serang–Yamansari), dengan kapasitas debit 250 liter/detik, dan telah selesai dilaksanakan pembangunannya. Sementara itu, untuk tahap II (Tuk Suci–Suniarsih), berkapasitas 400 liter/detik, sedang dalam pembangunan yang akan diselesaikan pada tahun 2014.

Adapun pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas tahap I (Banyumudal–Serang–Yamansari) termasuk bangunan pelengkapnya membutuhkan biaya sejumlah Rp 73.920.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), di mana pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara kontrak tahu jamak mulai tahun 2010 hingga 2012. Pelaksanaan kontrak tahun jamak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan

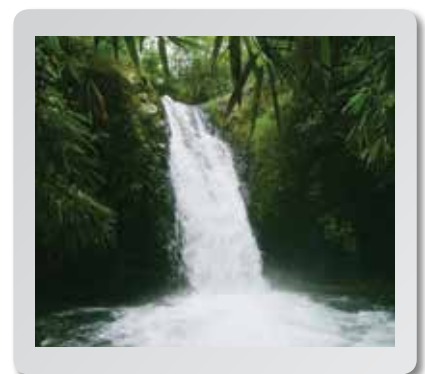


jaringan air baku kawasan Bregas (Banyumudal–Serang–Yamansari) merupakan pembangunan strategis, yang diharapkan dapat segera berfungsi. Hal lainnya bahwa sesuai Undang-Undang no.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jaringan air baku kawasan Bregas merupakan bagian dari pekerjaan kompleks dan satu kesatuan konstruksi sehingga diperlukan penanggung jawab pelaksana maupun konsultan *supervise* pada satu tangan

pelaksana untuk mempermudah pertanggungjawabannya bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Pertimbangan lainnya bahwa pekerjaan tersebut bersifat khusus yang penanganannya memerlukan tenaga khusus yang berpengalaman dan bersertifikat keahlian.

Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, yang meliputi 14 kabupaten/kota, memiliki potensi sumber air baku yang cukup besar, potensi air baku ini hendaknya dapat terus dikembangkan untuk pemenuhan penyediaan air bersih di Jawa Tengah dalam rangka menghitug percepatan target penyediaan air minum, potensi yang perlu dikembangkan salah satunya yakni pembangunan jaringan air baku di kawasan Bregas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Dengan telah terbangun prasarana fasilitas jaringan air baku oleh Ditjen SDA Kementerian PU, diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi dapat meningkatkan kualitas lingkungan Provinsi di Jawa Tengah, untuk itu Pemerintah Jawa Tengah terus mengharapkan dukungan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU, untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah, sehingga visi Pembangunan Jawa Tengah 2008–2013, yakni mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dapat tercapai. **(nan/ech)**



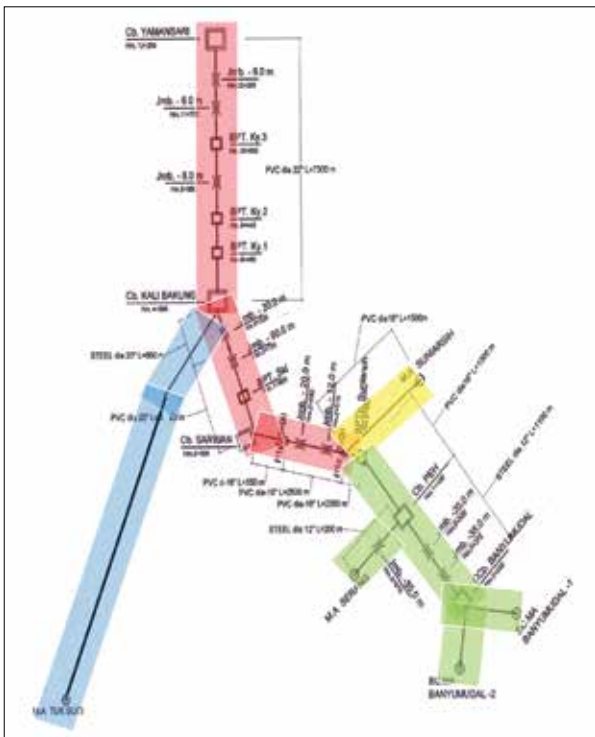


DATA KONTRAK

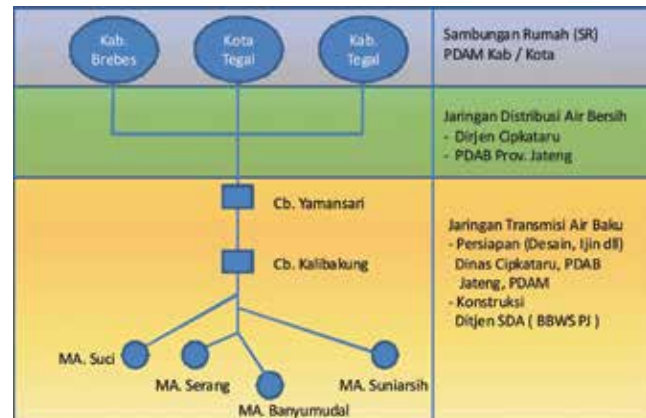
Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas (Banyumudal–Serang–Yamansari)
Nomor Kontrak	:	KU.03.01/Ao.6.8/Ao.5.2/16/2010
Waktu Pelaksanaan	:	Tanggal 19 November 2010 640 hari kalender (19 November 2010–19 Agustus 2012) Kontrak Multi Years
Masa Pemeliharaan	:	185 hari kalender
Nilai Kontrak Pekerjaan	:	Rp. 44.227.100.000,00
Pengguna Jasa	:	PPK Pengembangan Air Baku SNVT PPSDA Pemali Juana
Penyedia Jasa	:	PT. Adhi Karya (Persero)

SKEMA JARINGAN AIR BAKU

PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BAKU KAWASAN BREGAS



PEMBAGIAN TUGAS/PERAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BAKU KAWASAN BREGAS



GLOSSARY

Air Baku adalah Air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN O&P SUMBER DAYA AIR



Kasubdit Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan (OP), Hendra Ahyadi, mewakili Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Hartanto, membuka acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air di Batam (21/1). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di Wilayah Barat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Barat yang terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, serta BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas PU Sulawesi Barat dan Dinas PSDA Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Hendra mengatakan acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (O&P SDA) ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan program tahunan dan program jangka menengah di masing-masing Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dan SKPD Dinas Provinsi dalam rangka penyusunan kegiatan O&P SDA tahun 2014.

“Saat ini kita akan melakukan penyesuaian dan penajaman program dan kegiatan OP SDA dengan memperhatikan berbagai kebijakan dan aturan terkait serta keterlibatan pelaksana di lapangan yaitu Balai dan SKPD Dinas Provinsi,” ujar Hendra.

EVALUASI DAN KAJIAN PERSIAPAN PROGRAM

Dalam kesempatan yang sama Hendra juga menjelaskan, Ditjen SDA akan mengevaluasi program kegiatan di masing-masing BBWS/BWS, dan SKPD Dinas Provinsi yang telah dilaksanakan tahun 2012, serta mengkaji persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Kedua hal tersebut akan menjadi masukan berharga bagi perbaikan rencana kegiatan tahun 2014.

Diharapkan dengan proses perencanaan yang dilakukan sejak awal, dapat mewujudkan rencana kegiatan OP SDA tahun 2014 yang berkualitas, fokus, tidak tumpang tindih, saling melengkapi, terpadu dan berkesinambungan serta dapat diimplementasikan di lapangan. “Kita juga berharap pelaksanaan kegiatan OP mendukung 4 jalur pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yaitu pro-pertumbuhan (*pro-growth*), pro-lapangan kerja (*pro-job*), pro-pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), dan pro lingkungan (*pro-environment*),” kata Hendra.

Hendra juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Umum dan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan laporan progress kegiatan tahun 2012, dan segera menyusun rencana kerja tahun 2013, terutama jadwal lelang paket-paket kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual.

TANTANGAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT BINA OP

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, penyelenggaraan jaminan mutu, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan darurat akibat bencana.

Hendra mengakui bahwa melaksanakan hal tersebut bukanlah tugas yang mudah. "Tantangan yang dihadapi akan semakin berat dan bervariasi di masa mendatang. Jumlah penduduk

yang semakin meningkat yang sekaligus mendorong meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim dan lain sebagainya adalah realita yang harus dihadapi dan berhubungan langsung dengan tugas-tugas tersebut," urainya.

SINERGITAS PENYELENGGARAAN O&P SDA

Tahun 2014 nanti, pemerintah menargetkan pencapaian surplus beras sebanyak 10 juta ton. Untuk mendukung hal tersebut, tahun 2013 akan dilaksanakan kegiatan audit teknis. Audit teknis akan menunjukkan kondisi dan fungsi sarana serta prasarana yang ada. Berangkat dari itu, perencanaan yang tepat dapat disusun terkait rehabilitasi, pemeliharaan atau operasi, agar fungsi sarana dan prasarana tersebut dapat terjaga.

Hendra menekankan perlunya kerja keras, kerjasama, komunikasi dan kordinasi baik di tingkat Kementerian maupun dengan Balai dan SKPD di daerah sehingga tercipta sinergitas penyelenggaraan OP SDA yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan OP SDA yaitu terjaganya fungsi

infrastruktur untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, dapat terwujud.

RENCANA KEGIATAN 2014

Untuk tahun 2014, kegiatan BBWS atau BWS yang termasuk dalam kegiatan fisik OP sarana dan prasarana SDA adalah berupa pemeliharaan prasarana air baku, OP waduk/embung/situ, OP irigasi/rawa/tambak antarprovinsi dan bendung, OP sungai, OP pengendalian lahar/sedimen dan OP pengamanan pantai. Disamping itu Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan wajib balai dan kegiatan *soft component* PIRIMP/DISIMP. Sementara untuk TP-OP alokasi dana digunakan untuk OP irigasi kewenangan Pusat dan sebagian daerah irigasi rawa dan tambak.

Terkait dengan tugas utama balai sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal SDA untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan wajib balai, seperti menyusun neraca air dana lokasi air dalam rangka pemberian izin pemanfaatan air, *monitoring* banjir dan kekeringan, penguatan kelembagaan pengelolaan SDA, termasuk dalam hal ini menyusun manual OP, melakukan pelatihan, serta audit teknis, Hartanto meminta seluruh jajaran SDA memberikan perhatian khusus kepada kegiatan wajib balai tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA juga meresmikan website OP SDA, <http://sda.pu.go.id/binaop/>, sebagai media interaksi hal-hal yang terkait dengan OP seperti aturan-aturan yang digunakan dalam pelaksanaan OP sarana/prasarana SDA, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan serta *database* OP sarana dan prasarana SDA. Khusus untuk *database*, Hendra memohon kerjasama pengelola situs untuk memperbaharui data secara rutin agar *database* OP SDA selalu valid dan akurat. (*idr/chs*)





ROAD MAP OP SDA & DATABASE SDA



ROAD MAP OP SDA

JENIS SDA	KEY AREA	KOMPONEN
Pendayagunaan Irigasi, Konservasi Sungai, Konservasi Rawa, Konservasi Pantai, Pendayagunaan Air Baku	KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI	Kelembagaan pengelolaan dan OP irigasi Aspek organisasi
	SDM	Kualitas Kuantitas Sistem insentif dan disinsentif
	MASYARAKAT	Kapasitas masyarakat Partisipasi Kesadaran masyarakat
	KEUANGAN	Biaya operasi dan pemeliharaan irigasi
	SISTEM INFORMASI	Pengelolaan asset Kondisi infrastruktur Skema jaringan dan bangunan Keterbukaan informasi
	TEKNIS	Teknis pelaksanaan operasi Tata cara pemeliharaan Peralatan operasi dan pemeliharaan

POTENSI DAN TANTANGAN PENYEDIAAN AIR BAKU



Kondisi air baku di Indonesia saat ini tidak terlepas oleh pengaruh perubahan iklim dan menurunnya kuantitas dan kualitas akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus mengupayakan cara untuk dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan efektif yaitu terpenuhinya air bersih bagi seluruh makhluk hidup.

IUWASH yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau *U.S Agency for International Development (USAID)* melalui kegiatan *Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWWF)*, di tahun 2013 ini mengangkat persoalan air minum dan air limbah terbesar di Indonesia dengan tema "Inovatif Aplikatif untuk PDAM yang Lebih Baik". Acara ini didukung oleh Ditjen SDA dan Cipta Karya serta Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi).

Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH) merupakan program Air, Sanitasi dan Kebersihan untuk wilayah Perkotaan di Indonesia. IUWASH membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai target *Millenium Development Goals (MDGs)* melalui perluasan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang aman.





PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR BAKU

Dari total potensi air baku di Indonesia sebesar 3.9 triliun m³, baru ±14 milyar m³ atau ±57 m³ perkapita air baku yang dapat dikelola melalui tampungan. Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan dari Thailand (1.277 m³ perkapita) yang merupakan negara tetangga kita di Asia Tenggara.

Menyangkut hal tersebut diatas, Eka Nugraha Abadi, Kasubdit Air Baku dan Air tanah, Direktorat Irigasi dan Rawa, menyampaikan bahwa permasalahan dan tantangan muncul dalam penyediaan air baku seperti kebutuhan akan sumber daya air yang semakin meningkat hingga terhambatnya pelaksanaan pekerjaan fisik karena masalah pembebasan lahan. Tantangan lainnya berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air alami ataupun buatan yang sudah terbangun dan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber air untuk berbagai kepentingan.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mempunyai peranan penting untuk menangani konflik pemanfaatan sumber daya air. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004, pasal 11 ayat 1, Ditjen SDA menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

RENCANA DAN SOLUSI DALAM PENYEDIAAN AIR BAKU

Ditjen SDA mempunyai peranan penting untuk menangani konflik pemanfaatan sumber daya air. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004, pasal 11 ayat 1, Ditjen SDA menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

Beberapa kebijakan terkait pengembangan air baku agar masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang aman, diantaranya mengupayakan pembangunan penyediaan air baku skala Kawasan Regional, dan cost sharing antara Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi (APBD Prov) dan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota), penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Ditjen SDA juga mensinkronisasikan program pembangunan penyediaan air baku untuk air minum dengan Ditjen Cipta Karya untuk memenuhi target MDGs yaitu menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87% masyarakat Indonesia atas standar kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih 60 liter/orang/hari serta tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA) air baku.

Terdapat beberapa rencana penambahan kapasitas air baku dalam pemanfaatan potensi dan prasarana air baku seperti pembangunan bendungan diantaranya Kreuroto (1.140 liter/detik) di Aceh, Lau Simeme (3.000) di Sumatera Utara, Jatigede (3.500) dan Kuningan (300) di Jawa Barat, Karian (10.600) di Banten, Jatibarang (1.050) dan Pidekso (153) di Jawa Tengah,

Bendo (790) di Jawa Timur, Surga (23) dan Titab (350) di Bali, Marangkayu (200), Lambakan (12.000) dan Teritip (240) di Kalimantan Timur, Lolak (500) di Sulawesi Utara, Kolhua (322) dan Mbay (540) di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, agar masyarakat mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi, Ditjen SDA melakukan pemanfaatan bekas galian-galian tambang di Desa Kerang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat yaitu Kolong Kerang (10 liter/detik), Desa Terabek, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat yaitu Kolong Terabek (50), Desa Merawang, Kecamatan Baturusa, Kabupaten Bangka yaitu Kolong Merawang (100), Desa Air Gegas, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yaitu Kolong Air Bersih (20).

Dengan diadakannya lokakarya ini yang diselenggarakan di Jakarta (16/1), diharapkan dapat memacu pengembangan sistem penyediaan air minum dan air limbah, terutama dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Turut hadir dalam lokakarya ini, Kasubdit Air Baku dan Air Tanah, Direktorat Irigasi dan Rawa, Eka Nugraha Abadi, Direktur Produksi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara Heri Batanghari, Asisten Deputi Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Sri Tantri Arundharti. **(kty/dew)**



HUT KE-32 HATHI:

HATHI DIHARAPKAN TETAP PROFESIONAL DALAM MENANGANI SUMBER DAYA AIR



Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) adalah salah satu organisasi yang konsisten dan profesional dalam melaksanakan visi dan misinya. "Perkembangan dinamika lingkungan harus menjadi perhatian kita semua begitu juga dengan keadaan sumber daya air kita," ujar Djoko Kirmanto dalam acara HUT HATHI yang ke-32 (23/1) di Jakarta.

HUT HATHI adalah momen yang tepat bagi HATHI untuk melakukan evaluasi. Djoko Kirmanto meminta kepada pengurus dan anggota HATHI untuk tetap profesional dalam memberikan masukan dan solusi di bidang Sumber Daya Air.

Djoko Kirmanto berharap HATHI bisa lebih banyak memperkenalkan diri ke Universitas-universitas di Indonesia

dan diharapkan HATHI untuk masa mendatang tetap memberikan masukan dan kontribusi terutama pada masalah ketahanan pangan yang erat kaitannya dengan irigasi, banjir, longsor dan antisipasi *global warming*.

Mengenai banjir Jakarta, Djoko Kirmanto mengatakan berdasarkan data terakhir terlihat bahwa banjir di tahun 2013 berdampak di sebagian kecil wilayah Jakarta bila dibandingkan dengan tahun 2007. Maka dapat diketahui bahwa infrastruktur sumber daya air dan pengendali banjir yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat bermanfaat. **(anj)**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

"Perkembangan dinamika lingkungan harus menjadi perhatian kita semua begitu juga dengan keadaan sumber daya air kita. Meningkatkan pertumbuhan penduduk, tingginya aktivitas industri dan bertambahnya permukiman warga membuat air sudah tidak punya tempat lagi, karena sudah termakan oleh aktivitas manusia. Sehingga efeknya seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi kita harus *living in harmony with flood*," jelas Moch. Amron, Ketua Umum HATHI, dalam acara HUT HATHI, di Jakarta (23/1).

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berbasis wilayah sungai, ada



yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Untuk itu semua harus berkoordinasi dengan semua pihak seperti organisasi di bidang SDA, para pakar SDA dan Dewan SDA, yang merupakan organisasi yang menampung aspirasi semua pihak untuk memberikan masukan dan arahan mengenai konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.

Mengenai banjir yang saat ini sedang terjadi di Jakarta, ada beberapa alternatif yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pembangunan *deep-tunnel*. "Organisasi HATHI mendukung sekali solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka untuk pembangunan *deep-tunnel* harus dikaji terlebih dahulu tentang fungsinya, apakah efektif untuk mengurangi banjir, seberapa jauh bisa mengurangi kemacetan, seberapa besar fungsi air baku dan berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk *deep-tunnel*. Apabila mempunyai banyak dampak positif baru dan mempunyai peran yang sangat besar, bisa dilaksanakan dengan tidak melupakan operasi dan pemeliharaannya," kata Moch. Amron.

Moch. Amron berharap agar masalah banjir yang saat ini menimpa Jakarta dapat diselesaikan secepatnya dan masyarakat juga agar lebih bijak lagi dalam memperlakukan air melalui tindakan yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak tinggal di bantaran sungai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. **(tin)**